

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu negara yang menganut sistem demokrasi atau kesetaraan dan kebebasan adalah negara Indonesia. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 (1) UU No. (9) Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam negara demokrasi terdapat masyarakat yang demokratis. Hal-hak dan kebebasan mereka harus dihormati. Kebebasan individual dan social setiap masyarakat harus terpenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini (Rosana, 2016, p. 38). Dari hal tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap individu dapat memilih Langkah-langkah terbaik untuk megembangkan dirinya sendiri bahkan untuk masyarakat luas. Hal tersebut juga mempengaruhi hak individu sebagai warga negara untuk memilih calon pemimpinnya melalui pemilu.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar dari demokrasi. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Walaupun hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif

dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum. Keikutsertaan dalam hal ini tidak melihat dari segi status sosial apapun, laki-laki, perempuan, tua, muda (diatas 17 tahun). Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat menjadi seorang pemimpin di lingkungannya.

Kedudukan perempuan dalam bidang politik semakin diperkuat dengan adanya UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Meskipun pada kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam lembaga legistatif tidak mencapai kuota 30%. Komposisi perempuan pada setiap fraksi di DPR RI dan jumlah perempuan pada setiap periode DPR RI terus berubah. Hasil pemilu 2014 terpilih 97 orang perempuan atau sekitar 17,3% dari 560 anggota DPR RI. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya dimana terdapat 99 perempuan atau sekitar 17,7%. Selain mengacu pada keterwakilan perempuan di kursi dewan, kiprah perempuan di sektor publik juga nampak pada dipangkunya jabatan menteri oleh perempuan. Posisi perempuan di badan eksekutif khususnya di jabatan kabinet perempuan yang menjabat sebagai menteri jumlahnya relative lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki.

Banyak faktor yang menghalangi hadirnya pemimpin perempuan, seperti kultur atau budaya yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari dalam suatu populasi masyarakat. Contohnya adalah budaya patriarki yang dominan dan merajalela dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan

bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit atau kurangnya sumberdaya untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan (Harnoko, 2012, p. 230). Dalam era 4.0 ini peran media sosial tidak dapat kita lupakan, karena saat ini media memegang peranan penting dalam hal menyampaikan informasi apapun dengan cepat dan praktis. Selain itu tanpa disadari dapat diketahui bahwa tindakan afirmatif yang menjebolkan kuota 30 % perempuan di politik adalah perjuangan perempuan di kelas menengah atas, tanpa persiapan kader-kader yang memang layak di tempatkan untuk menjadi petarung politik. Seringkali perempuan hanya dianggap penguasa domestik (ibu rumah tangga) dan tidak layak untuk berperan di ranah publik. Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada pemilihan di tingkat pusat, tetapi hingga tingkat daerah bahkan desa.

Dalam Permendagri 72 tahun 2020 Pasal 21 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa atau yang sering disebut dengan Pilkades telah tertera bahwa tidak disebutkan gender khusus untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa politik tidak bersifat maskulin dalam peraturannya. Tidak dapat dipungkiri juga sudah banyak beberapa perempuan yang terjun ke ranah publik dan berkecimpung di dunia politik yang kemudian berhasil dalam memenangkan kontestasi pemilihan dan berhasil pula memimpin suatu daerah tersebut. Contohnya yaitu Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini M.T, Walikota Surabaya (Hafsah & Kartika Sari, 2018, p. 886). Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur pada 20 November 1961 ini sudah menjabat sebagai Walikota Surabaya selama 2 periode berturut-turut sejak 2010 hingga 2021. Prestasi yang sudah diraih oleh Risma adalah menjadi salah

satu nominasi Walikota terbaik di dunia pada tahun 2012 pada ajang World Mayor Prize yang pada saat itu diadakan oleh oleh The City Mayors Foundation. Segudang prestasi yang sudah ia capai selama menjabat sebagai Walikota Surabaya menjadi alasan dia terpilih menjadi salah satu nominasi ajang tersebut.

Pada tahun 1989 terdapat Pemilihan Kepala Desa di Desa Simbangdesa yang mana pada pemilihan tersebut adalah Pemilihan Kepala Desa yang pertama kali diikuti oleh calon pemimpin perempuan sejak desa tersebut berdiri. Calon Kepala Desa ini bernama Sri Hartatik, yang mana pada saat itu bersaing dengan 4 (empat) calon Kepala Desa lain yang bernama M. Azam, Wardoyo, Luza Husaini, dan Subkhan. Sehingga pada saat pemilihan tersebut terdapat 5 (lima) calon Kepala Desa Simbangdesa. Hasil akhir Pemilihan Kepala Desa tahun 1989 ini menghasilkan bahwa Sri Hartatik tersebut belum dapat menduduki kursi Kepala Desa Simbangdesa atau dinyatakan kalah. Masyarakat menganggap bahwa faktor yang menyebabkan kekalahan Sri Hartatik adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Diketahui bahwa pada saat itu terdapat salah satu calon yang posisinya dianggap kuat yaitu Wardoyo. Beliau diusung oleh mayoritas masyarakat Desa Simbangdesa sehingga mendapat banyak dukungan dan suara yang menghasilkan sebuah kemenangan. Selain hal tersebut, diduga karena Sri Hartatik adalah seorang perempuan dan beretnis cina. Pada masa tersebut masyarakat masih menganggap bahwa posisi pemimpin haruslah diduduki oleh seorang laki-laki dan etnis cina dapat dikatakan sebagai etnis minoritas di dalam masyarakat Desa Simbangdesa.

Desa Simbangdesa sudah melewati beberapa kali Pemilihan Kepala Desa yang didalamnya tidak ada satupun keterwakilan perempuan dalam kurun waktu 29 tahun hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 kembali diadakannya Pemilihan Kepala Desa dan kembali

terdapat calon Kepala Desa perempuan dalam pemilihan tersebut, beliau bernama Enung Nurhayati. Beliau adalah satu-satunya calon perempuan dalam pemilihan saat itu yang bersaing dengan dua calon, yaitu Budianto dan Eko Suryanto. Dalam Pilkades serentak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Batang masih tergolong sedikit adanya partisipasi politik dari Calon Kepala Desa Perempuan. Bahkan pada tingkatan Kecamatan Tulis sendiri tercatat hanya terdapat 3 cakades perempuan. Dengan zaman yang sudah berkembang dan berkaca pada keberhasilan pemimpin perempuan yang sudah ada di Indonesia, Enung selaku salah satu calon Kepala Desa perempuan masih belum dapat menduduki kursi Kepala Desa Simbangdesa atau dinyatakan kalah. Beliau masih belum berhasil medobrak stigma dan berbagai faktor lainnya. Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Calon Pemimpin Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Tahun 2019”**, maka akan menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam terkait bagaimana saja tanggapan masyarakat Desa Simbangdesa terkait Calon Pemimpin Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari adanya latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Calon Pemimpin Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Simbangdesa terkait adanya calon Pemimpin Perempuan di Desa Simbangdesa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perempuan dalam partisipasinya di kontestasi politik lokal yaitu Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pilkadaes Simbangdesa Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan acuan dalam menganalisis dinamika dalam pemilihan Kepala Desa, terutama melihat dalam hal perspektif pengarusutamaan gender.
- b) Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Mempelajari dan mengetahui tentang pengarusutamaan gender pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- b) Menambah wawasan peneliti mengenai dinamika yang ada dalam pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- c) Memberikan gambaran tentang peranan perempuan di dalam ranah politik.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

**Tabel 1. 1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis dan Hasil Penelitian
1.	PERSEPSI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN	(Hafsah & Kartika Sari, 2018) Penelitian ini menjelaskan tanggapan dan harapan dari pemilih pemula yang ada di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan. Penulis menggunakan teori persepsi yang dicetuskan oleh Brunner. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian untuk mengkaji keabsahan data pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Hasil yang didapatkan pada penelitian kali ini adalah pemilih pemula masih menganggap bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki, menurut mereka perempuan sebaiknya menduduki jabatan wakilnya saja.
2.	POLITIK HUKUM KESETARAAN GENDER DI INDONESIA	(Dessy Artina, 2010) Pada penelitian ini penulis beranggapan bahwa sejauh membahas persoalan yang menyangkut gender yang mana secara umum kaum perempuan lebih merasakan dampak negatifnya daripada kaum laki-laki, budaya patriarkhialah yang menjadi akar permasalahannya. Jika disangkutkkan dengan hukum yang ada di Indonesia maka dapat diketahui bahwa politik hukum di Indonesia dalam prespektif gender masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak perauran perundang-undangan yang belum berprespektif gender.
3.	PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER	(Zamroni, 2013) Menurut penulis, cara untuk mengetahui ada atau tidaknya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam politik dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Peran perempuan sebagai komunikator politik tidak hanya sebagai terlibat dalam struktur organisasi partai politik, atau menduduki kursi legislatif, tetapi dilihat dari efektivitas dan dampak nyata yang dihasilkannya. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menciptakan berbagai perubahan sistem regulasi untuk mendobrak ketidaksetaraan gender dan meningkatkan taraf hidup perempuan itu sendiri.

4.	PEREMPUAN KEPALA DAERAH DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERPERSPEKTIF GENDER DI INDONESIA	(Dewi, Letty Aziz, & Ikfal Raharjo, 2014) Penelitian ini didasarkan oleh kesenjangan antara kenyataan empiris semakin banyak perempuan pemimpin politik yang sudah bermunculan yang membuat dunia politik semakin berwarna mewarnai dinamika politik lokal. Masih sedikitnya kajian secara serius menganalisis faktor-faktor empiris dibalik kemenangan perempuan pemimpin politik lokal. Dari banyaknya kemunculan dan kemenangan perempuan pemimpin politik lokal maka hal tersebut menandakan bahwa adanya perkembangan baru mengenai gender. Dari hal tersebut, penulis menggunakan perspektif gender dalam analisis politik, karena penelitian ini ditujukan untuk menghadirkan pemahaman baru dan empiris tentang kemunculan dan kemenangan para perempuan dalam politik lokal.
5.	PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KONTEKS NEGARA DEMOKRASI	(Harnoko, 2012) Dalam demokrasi sangatlah penting membuat upaya peningkatan kualitas dan representasi perwakilan perempuan dalam politik. Harus diberikan hak kesempatan yang sama baik bagi laki-laki ataupun perempuan sebagai manifestasi dari hak-hak politik mereka. Pemerintah sudah memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas politik, yaitu dengan memberikan strategi afirmatif perempuan kuota 30% bagi perempuan. Maka dari itu perlu diadakannya pendidikan politik perempuan karena diharapkan dapat mengubah image masyarakat tentang politik yang selama ini dirasa bersifat maskulin atau didominasi oleh kaum laki-laki.
6.	PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MUKTISARI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020	(Garis & Tristina, 2021) Dalam penulisan ini tujuan penulis adalah untuk mengetahui partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Tahun 2020. Ditemukannya beberapa indikator permasalahan yaitu partisipasi politik perempuan dalam Pilkades serentak tahun 2020 yang kurang di desa tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat di desa tersebut tentang pentingnya peranan gender, kemudian pendidikan politik di desa tersebut dirasa masih sangat rendah. Dalam penelitian ini Panitia Pilkades dan Tokoh Masyarakat menjadi Informan. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa semua calonnya laki-laki dan menganggap perempuan



		hanya bisa melakukan kegiatan di ranah domestic tidak di ranah publik karena kurangnya edukasi yang didapat oleh masyarakat desa tentang peranan gender.
7.	PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PENELITIAN DI DESA NOMPOREJO, KECAMATAN GALU, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YO GYAKARLA)	(Kusumastuti, 2019) Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perempuan memberikan partisipasi politiknya dalam Pilkadaes Nomporejo pada tahun 2015. Menggunakan metode kualitatif deskriptif yang kemudian dalam menentukan informan penulis menggunakan Teknik purposive sampling. Data-data yang sudah didapatkan akan direduksi berdasarkan keperluan yang kemudian ditarik kesimpulan untuk dipaparkan. Simpulan yang didapat adalah partisipasi masyarakat perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa di desa tersebut dirasa rendah dikarenakan perempuan masih ter subordinasi oleh kaum laki-laki.
8.	MODAL CALEG PEREMPUAN DAN POLITIK PATRIARKHI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SLEMAN	(Ramdhani & Rahmawati, 2020 ) Penelitian kali ini meneliti tentang Pemilu di Kabupaten Sleman Tahun 2019 yang didalamnya dipaparkan tentang politik patriarkhi yang berimbas kepada caleg perempuan. Penulis menggunakan teori Bourdeu tentang modal. Modal yang dirasa penting untuk perempuan ketika masuk ke dalam ranah politik adalah modal social, modal ekonomi, dan simbolik atau branding. Pada akhirnya hal itu di hadangi oleh politik patriarkhi yang mana caleg perempuan dalam kesadarannya mengarungi medan persaingan politik dan pemilu tetapi masih didominasi oleh kaum laki-laki. Afirmasi bagi caleg perempuan memang ada, namun dalam praktiknya terdapat penghambat dari politik patriarkhi yang mengendalikan dan menyebabkan tidak memungkinkannya caleg perempuan untuk lebih unggul dari caleg laki-laki dalam mendapatkan suara.
9.	MENGHADIRKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA	(Ardiansa, 2016) Penulis menjelaskan di dalam penelitian ini bahwa di dalam konteks praktik representasi, untuk menghadirkan kembali kepentingan perlu diadakannya klaim presentasi politik non-elektoral oleh gerakan-gerakan perempuan. Urgensi gerakan perempuan tersebut dilakukan untuk memaksa dan

		menuntut komitmen dari partai politik terhadap kepentingan-kepentingan perempuan, yang pada akhirnya membangun hubungan yang bersifat antagonistic. Pada proses menghadirkan kepentingan, peran dari aktor representasi politik non-elektoral menjadi sangat penting termasuk untuk mendorong antagonisme posisi politik kekuatan di parlemen terhadap suatu wacana atau isu.
10.	ISLAM, PEREMPUAN DAN POLITIK: ARGUMENTASI KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI	(Fadli, 2017) Diketahui dalam penelitian ini bahwa adanya keterlibatan perempuan NU (Nahdlatul Ulama) dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang dilandasi pada nilai-nilai Islam. Teori partisipasi politik dan konsep feminisme digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan NU berhasil meningkat dalam politik khususnya di kursi DPR RI (parlemen).
11.	KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL	(Nurul Widyawati Islami Rahayu, 2014) Penelitian ini hendak mencari perbandingan data laki-laki dan perempuan yang dilibatkan dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode wawancara. Kemudian menggunakan Teknik snowball pada penetapan berapa banyaknya responden yang diperlukan. Penulis menggunakan kriteria eksklusif-inklusi data yang mana membuang data yang tidak perlu dipakai dan memasukan data yang relevan untuk menjawab masalah dalam penelitian yang kemudian terciptalah suatu konsep atau suatu pernyataan yang bersifat teoritik.
12.	DINAMIKA POLITIK PILKADES DI ERA OTONOMI DAERAH	(Alamsyah, 2011) Penulisan ini menjelaskan nexus candidate-voter dalam konteks Pilkades di Indonesia. Pilkades sebagai proses politik terjadi dalam latar sosial tertentu atau dapat diartikan dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan demografis pada tingkat desa. Terdapat empat variabel yang mempengaruhi perilaku calon Kepala Desa yakni: kelas sosial, kebijakan, image politik, media komunikasi dan informasi politik, dan isu-isu politik. Sedangkan dari sisi para pemilih pilkades, variabel kelas sosial, motivasi, evaluasi retrospektif, dan kapasitas mengolah informasi, media komunikasi dan

		informasi, dan isu-isu politik dianggap mempengaruhi perilaku pemilih.
13.	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	(Tome, Rusman, & Ibrahim, 2021) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan ststue approach dan conceptual approach atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang menyangkut isu hukum yang sedang dihadapi, dalam hal ini UUD NRI tahun 1945 yaitu UU No. 6 tahun 2014 dan peraturan lainnya yang saling terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam proses demokratisasi di wilayah desa.
14.	DINAMIKA POLITIK DESA STUDI TENTANG RELASI KUASA ELIT DESA DAN POLITIK PILKADES DI KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR	(Tokan & Ola, 2020) Penelitian ini menyebutkan bahwa adanya 3 poin utama yang melekat dengan peta dan dinamika politik pemerintahan desa pada saat ini, yaitu Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan elit tradisional (tokoh masyarakat). Di dalam masyarakat pasti selalu dijumpai satu kelompok individu atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, atau sering dipertimbangkan setiap usulannya, walau tidak sepenuhnya sesuai yang mereka mainkan. Kepala Desa dan BPD diberi otoritas formal dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsinya yang berbeda, tetapi mereka tetap bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Kemudian dari hal tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan berbagai bentuk dan ruang kekuasaan yang diperankan oleh elit desa.

Dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas sebagian besar merujuk pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan partisipasi juga keterwakilan perempuan dalam politik yang dalam hal ini adalah politik lokal. Belum ada yang studi terdahulu yang membahas tentang Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Calon Pemimpin Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten

Batang Tahun 2019, maka dari itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini bukanlah buah dari hasil pemikiran orang lain melainkan menjadi penelitian baru yang datang dari pemikiran sendiri.

Dalam penelitian kali ini yang membuat perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat Desa Simbangdesa tentang adanya calon pemimpin perempuan yang ada dalam Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa tahun 2019. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang sudah dipaparkan, penelitian ini menarik karena berfokus pada baik atau buruknya persepsi masyarakat Desa Simbangdesa kepada calon pemimpin perempuan yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019 dan faktor-faktornya yang mempengaruhi ketidakberhasilan calon perempuan tersebut memenangkan Pilkadaes 2019 di Desa Simbangdesa.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

Menurut Sobur dalam (Riwana, 2003) secara etimologis, kata persepsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya perception dari percipere yang berarti menerima atau mengambil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi berarti tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan atau suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan Brunner dalam (Hafsah & Kartika Sari, 2018, p. 884) menjelaskan lebih terperinci tentang arti dari kata persepsi. Menurutnya persepsi adalah proses pengkategorisasian atas sesuatu. Organisme dirangsang oleh suatu implus atau kejadian yang kemudian organisme itu

merespon dengan menghubungkan implus itu dengan salah satu kategori (golongan) objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Proses aktif dimana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategori yang tepat adalah proses penghubungan, sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. Dapat diartikan juga bahwa persepsi adalah suatu kegiatan menarik kesimpulan atau inferensial.

Menurut Bruner proses pengambilan keputusan persepsi dalam (Hafsah & Kartika Sari, 2018, p. 884) terdapat empat tahap, yaitu:

- 1) Kategorisasi primitif, dimana objek atau peristiwa diamati, pisah-pisahkan, dan diberi tanda berdasarkan ciri-ciri khusus. Proses ini memberikan arti terhadap suatu objek persepsi yang masih sangat minim. Tidak jarang masyarakat memilih pemimpin didasari hanya dengan rasa suka bahkan nyaman. Dalam hal ini yang di maksud adalah sikap dan pembawaan (gestur) calon pemimpin tersebut. Kedekatan emosional juga sangat berpengaruh dalam proses pemilihan calon pemimpin. Bahkan dari hal-hal kecil yang pernah dilakukan oleh calon pemimpin yang menurut orang lain tidak berarti, bagi sebagian orang menjadi sangat berarti dan hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan oleh calon pemilih atau masyarakat itu sendiri. Persepsi publik dan merekayasa pencitraan (branding) oleh diri calon pemimpin tidaklah hanya dibangun dalam satu tahun saja, perlu adanya usaha yang sistematis dan terukur agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. karena hal ini penting untuk menjadi tolak ukur masyarakat dalam melihat calon pemimpin.
- 2) Mencari tanda (clue search), dimana pengamat secara cepat memeriksa (scanning) lingkungan untuk mencari informasi-informasi tambahan untuk

memungkinkannya melakukan kategorisasi yang tepat. Dalam hal untuk memilih calon pemimpin, pendidikan politik merupakan hal yang penting untuk dipahami. Pendidikan politik dapat menumbuhkan skeptisisme politik, dalam hal ini skeptisisme ilmiah, tidak mudah percaya dan sikap naif tidak kritis yang mana mudah percaya dan mudah termakan dontrin-doktrin politik bahkan mitos politik yang sifatnya dapat membuat daya kognitif atau pengenalan terlena. Kemudian wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya, yang mana dengan itu masyarakat akan menjalankan fungsi kontrol politik, dengan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat menjadi modal untuk masyarakat dalam proses menyeleksi siapa pemimpin yang dirasa mampu untuk memimpin.

- 3) Konfirmasi, proses ini terjadi pada saat objek sudah mendapatkan penggolongan sementara. Pada tahap ini pengamat tidak lagi terbuka untuk sembarang masukan, melainkan ia hanya menerima tambahan informasi yang akan memperkuat (mengkonfirmasi) keputusannya. Masukan-masukan yang tidak relevan dihindari. Tahap ini oleh Bruner dinamakan juga proses seleksi melalui pintu gerbang (*selective gating process*). Di dalam proses politik, keputusan untuk memilih seseorang calon menjadi hal yang krusial, karena pemimpin tersebut akan memiliki kuasa dalam menjalankan tugasnya. Seringnya, ketika masyarakat yang sudah mempunyai dasar pendidikan politik dan sudah menentukan siapa yang akan mereka pilih, mereka akan konsisten hingga akhir untuk mendukung calon yang mereka pilih kecuali jika ada hal yang signifikan

yang menurut mereka tidak ada alasan lagi untuk mereka tetap memilih calon tersebut sehingga mereka memilih calon lain untuk menjadi pemimpin.

- 4) Konfirmasi tuntas, proses ini sudah mengakhiri kegiatan pencarian. Tanda-tanda yang baru diabaikan saja dan tanda-tanda yang tidak konsisten dengan kesimpulan yang sudah dibuat juga diabaikan saja atau diubah sedemikian rupa sehingga cocok dengan kategori yang sudah dipilih. Dalam proses politik jika masyarakat sudah bulat keputusannya untuk memilih calon yang diyakini untuk menjadi pemimpin, mereka akan setia mendukung. Misalnya jika dalam suatu pemilihan kepala daerah, mereka akan mendukung dengan mem-vote calon tersebut, bahkan ada pemilih yang fanatik dan juga militan yang mana mereka tidak segan untuk mengajak orang lain untuk ikut mendukung pilihannya.

Menurut Gibson, dkk dalam (Hikmah, 2013) faktor-faktor yang membentuk persepsi terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Faktor Internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup hal antara lain:

- 1) Fisiologis.

Informasi yang masuk melalui alat indra manusia yang nantinya akan mengartikan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan yang dipunyai oleh alat indra untuk mempersepsi pada setiap orang berbeda sehingga interpretasi terhadap lingkungan dapat berbeda.

- 2) Perhatian

Individu memerlukan energi untuk memperhatikan atau fokus terhadap bentuk fisik suatu obyek. Setiap orang mempunyai energi yang berbeda

sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan persepsi terhadap suatu obyek.

3) Minat atau Ketertarikan

tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi bergantung pada persepsi terhadap suatu obyek yang sangat bervariasi. kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat sering disebut dengan Perceptual Vigilance.

4) Kebutuhan yang searah

Jawaban yang dibutuhkan tergantung pada bagaimana kuatnya seorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan mereka jawaban yang mereka butuhkan.

5) Pengalaman dan Ingatan

Hal ini sangat berkaitan dengan ingatan yang dapat diartikan bahwa sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian masa lalu untuk mengetahui suatu rangsang dalam artian yang luas.

6) Suasana Hati.

Keadaan emosi seseorang sangat mempengaruhi perilakunya, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

b. Faktor Eksternal

Elemen-elemen yang terdapat pada faktor eksternal adalah obyek-obyek yang merupakan karakteristik dari lingkungan. Elemen tersebut sangat berpengaruh



pada cara pandang seorang terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan menerimanya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

1) Ukutan Dan Penempatan Obyek Dari Stimulus

Hal ini menyatakan bahwa semakin besar relasi suatu obyek, maka semakin mudah dalam menerjemahkan dan mengambil keputusannya. Proses ini dalam penilaiannya dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek untuk menarik sebuah persepsi

2) Warna dari Obyek-obyek

Jumlah cahaya yang lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan jumlah cahaya yang sedikit pada obyek.

3) Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Akan menarik banyak perhatian jika stimulus dengan bentuk latar belakang sekelilingnya diluar dugaan individu lain.

4) Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Kekuatan suatu stimulus dapat mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek. Stimulus dari luar akan memberi makna yang lebih mendalam antara yang sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat.

5) Motion atau Gerakan

Perhatian terhadap obyek oleh individu akan lebih banyak tercurahkan kepada objek yang bergerak dalam jangkauan daripada memperhatikan objek yang diam.

## **2. Perempuan Dalam Politik**

Perempuan diketahui sering kali dilemahkan oleh lingkungannya, ada 2 paradigma teori dalam ilmu social yaitu teori fungsional dan teori Marxis. Kaum fungsional melihat pembagian kerja secara seksual merupakan kebutuhan bersama yang diciptakan masyarakat itu sendiri dan menjelaskan bahwa pengauran ini berguna untuk meniadakan persaingan antara suami dan istri yang merusak keharmonisan rumah tangga. Sedangkan kaum Marxis melihat keteraturan social tersrbut adalah buatan manusia, terutama oleh pihak mana yang diuntungkan darinya. Menurut mereka dalam pembagian peran gender, jelas laki-lakilah yang diuntungkan karena ia akan bersikeras untuk mempertahankannya. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa mengapa pembagian kerja secara seksual bisa bertahan ribuan tahun lamanya? bukan karena hal tersebut suatu yang alamiah, melainkan karena lelaki masih tetap berkuasa (Budiman, 1982, p. 15).

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Arief Budiman hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa laki-laki membatasi gerak perempuan yang ingin mengembangkan potensi dirinya. Banyak mimpi perempuan di luar sana yang terkubur bukan karena dirinya tidak mampu tetapi karena konstruk sosial yang terwariskan membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Hal tersebut membuat perempuan ragu untuk berpartisipasi dalam ranah publik atau bahkan ke ranah politik. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya dukungan moral dari masyarakat yang mempercayai bahwa perempuan juga bisa menangani hal tersebut. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini sudah banyak perempuan yang berpartisipasi dalam ranah politik.

Menurut Gatara dan Dzulkiah dalam (Fadli, 2017) partisipasi politik masyarakat timbul secara luas disebabkan oleh beberapa hal: 1) moderasi yang terjadi dalam semua bidang yang kemudian menyebabkan masyarakat banyak berpartisipasi dalam politik. 2) Perubahan dalam struktur kelas sehingga timbul persoalan mengenai siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik yang mengakibatkan perubahan dalam cara partisipasi politik. 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi telah menyebar ke negara-negara baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi secara matang. 4) Konflik antar kelompok pemimpin politik. Bila timbul konflik antara elit, maka yang dicari adalah rakyat. 5) keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Perkara tersebut seringkali memicu hadirnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Kemudian menurut Bari dalam (Kusumastuti, 2019) berpendapat bahwa perdebatan tentang pentingnya partisipasi atau keterwakilan politik perempuan terkait dengan intrinsic maupun instrumentalist argument. 25 Intrinsic argument merujuk pada argumentasi bahwa dari perspektif hak asasi manusia, kaum perempuan harus memiliki kesetaraan partisipasi dan perwakilan, karena faktanya setengah dari penduduk dunia adalah perempuan. Sedangkan instrumentalist argument merujuk pada fakta empirik bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda. Perbedaan inilah yang pada akhirnya akan membawa perbedaan cara pandang tentang politik. Diasumsikan bahwa perempuan akan membawa fokus yang berbeda dengan nilai-nilai feminis ke dalam aktivitas publik.

Selanjutnya menurut Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati ada beberapa faktor penting dalam pencalonan partisipan politik perempuan. Faktor modal politik, ekonomi, sosial, budaya dan simbolik sangat penting untuk terjun dalam politik bagi caleg perempuan. Tetapi, modal-modal ini ditentukan oleh habitus politik patriarkhi dalam kesadaran diri para caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Semua ini merupakan praktik politik yang mencerminkan kekerasan simbolik dan lembut sehingga dominasi patriarkhi tampak sah dan “memihak perempuan” yang kemudian dilegitimasi oleh kekuasaan dan kebijakan politik (Ramdhani & Rahmawati, 2020 , p. 57).

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum. Instrumen hukum tersebut menghasilkan sensitive gender yang selama ini terabaikan, sehingga menghambat perempuan diberbagai sektor kehidupan. Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum (Pemilu) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan perempuan (Garis & Tristina, 2021, p. 172).

Kepemimpinan merupakan suatu modal penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin suatu organisasi. Seorang pemimpin juga harus mempunyai efektivitas dalam kecakapannya untuk mempengaruhi dan mengarahkan para anggota. Faktor penting dalam sebuah kepemimpinan adalah perilaku pemimpin atau gaya kepemimpinan yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan proses kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat diartikan dengan perilaku atau tata cara

yang dipilih seorang pemimpin memengaruhi perilaku bawahan atau anggotanya agar mau bekerja sama secara produktif dan progresif untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Sampai saat ini dominasi laki-laki sebagai pemimpin dapat dilihat masih dirasa kuat dalam sebuah organisasi atau institusi. Walaupun pada kenyataannya dalam hal memimpin, pemimpin perempuan juga memiliki potensi yang bisa disandingkan dengan laki-laki. Tidak sedikit yang menghubungkan kemampuan seorang individu dalam memimpin dengan aspek biologis yang melekat pada diri seorang pemimpin tersebut berdasarkan kelamin laki-laki dan perempuan. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan yang daripada itu menempatkan perempuan dalam kondisi tidak diuntungkan walaupun perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya lebih besar di seluruh bagian dunia.

Laki-laki dan perempuan menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam menjalankan kepemimpinannya. Laki-laki dirasa lebih menggunakan norma keadilan dan perempuan menggunakan norma persamaan. Seorang perempuan memiliki sifat demokratis dan rasa kepedulian yang tinggi.

Secara umum ada 2 (dua) gaya kepemimpinan khas perempuan yakni kepemimpinan transformasional-transaksional dan kepemimpinan maskulin-feminim (Fitriani, 2015)

a) Kepemimpinan Transformasional-Transaksional diartikan sebagai kemampuan sebagai kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih daripada yang direncanakan secara orisinal dan untuk imbalan internal.

b) Feminim dan Maskulin mempunyai ciri-ciri :

1. Kemampuan untuk membujuk, perempuan pemimpin umumnya lebih persuasif bila dibandingkan dengan laki-laki, ia cenderung lebih berambisi dibandingkan laki-laki keberhasilannya dalam membujuk orang lain untuk berkata “ya” akan meningkatkan egonya dan memberinya kepuasan. Meskipun demikian, saat memaksakan kehendaknya, sisi sosial, feminin, dan sifat empatinya tidak akan hilang.
2. Membuktikan kritikan yang salah, mereka “belum bermuka tebal”, perempuan pemimpin memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, artinya mereka masih bisa merasakan rasa sakit akibat penolakan dan kritik. Namun, tingkat keberanian, empati, keluwesan, dan keramahan yang tinggi membuat mereka cepat pulih, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju dengan sikap positif “akan saya buktikan.
3. Semangat kerja tim, perempuan pemimpin yang hebat cenderung menerapkan gaya kepemimpinan secara komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mereka juga lebih fleksibel, penuh pertimbangan, dan membantu stafnya. Bagaimanapun, perempuan masih harus banyak belajar dari laki-laki dalam hal ketelitian saat memecahkan masalah dan membuat keputusan.
4. Sang pemimpin, perempuan pemimpin yang hebat umumnya memiliki karisma yang kuat, begitu juga laki-laki. Mereka persuasif, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik.

5. Berani mengambil risiko, tidak lagi berada di wilayah yang aman, perempuan pemimpin pada dasarnya berani melanggar aturan dan mengambil risiko, sama seperti laki-laki sekaligus memberi perhatian yang sama pada detail. Mereka berspekulasi di luar batas-batas perusahaan, dan tidak sepenuhnya menerima aturan struktural yang ada, seperti peraturan dan kebijakan perusahaan.

### **3. Kesetaraan Gender**

Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah perbedaan tentang konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender yang berbeda. Pengertian seks (jenis kelamin) adalah konsep tentang pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditetapkan secara biologis atau alamiah (kodrati). Contohnya laki-laki mempunyai alat reproduksi berupa penis dan buah zakar untuk menghasilkan sperma dan perempuan memiliki alat reproduksi rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan memiliki alat menyusui. Dapat diartikan bahwa hal di atas bersifat mutlak dan tidak bisa dipertukarkan atau sering disebut ketentuan tuhan atau kodrati.

Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang di konstruksi secara social maupun kultural. Contohnya bahwa perempuan sering dinilai cantik, lemah lembut, emosional, atau keibuan. Ciri tersebut merupakan hal yang dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Ada juga perempuan yang bersifat kuat, rasional, perkasa dan lainnya seperti yang sering dicap sebagai sifat maskulin atau sifat laki-laki. dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran yang dapat dipertukarkan atau dapat dipakai oleh semua jenis kelamin. Sayangnya, kesalahan dalam konsepsi seks dan gender ini diwariskan kepada anak cucunya sehingga terjadi konstruk social yang mengkotak-kotakkan jenis kelamin

yang satu harus melakukan sesuatu tersebut dan Ketika tidak menjalankan hal tersebut akan dianggap melakukan kesalahan. Misalnya laki-laki dikenal sebagai pribadi yang Tangguh, Ketika ada laki-laki menangis aka nada perkataan “laki-laki kok cengeng” sedangkan laki-laki dan perempuan mempunyai perasaan yang sama dan perasaan tersebut valid adanya.

Pandangan Gender yang salah kaprah ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap para kaum perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dahulu kala, di Jawa beredar anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan mengurus dapur juga (Faqih, 2013, pp. 13-16). Anggapan tersebut masih belum hilang sepenuhnya karena sudah terkonstruksi turun-temurun dari orangtua terdahulu, hal tersebut harus diedukasi atau dikomunikasikan tidak hanya kepada generasi selanjutnya tetapi ke generasi sekarang juga.

Komunikasi social gender dalam masyarakat berkaitan erat dengan kebudayaan. Beberapa makna untuk maskulinitas dan feminitas, dan bagaimana mengkomunikasikan identitas gender sebagian besar ditentukan oleh budaya. Budaya terdiri dari sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang membentuk ideologi atau sistem sosial tertentu. Cara manusia mengkomunikasikan identitas gender dipengaruhi oleh budaya, penafsiran, pemahaman, penilaian, dan media yang menampilkan beragam peran gender.



Kehidupan sosial mengenai gender menjadi kepentingan dan kebutuhan di dalam masyarakat. Kesetaraan gender bukan berarti untuk memunculkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk melengkapi fungsi sosial di masyarakat. Struktur sosial ekonomi masyarakat dipedesaan masih kental bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga ranah perempuan masih dianggap sebagai ruang domestik. Dengan hal itu, partisipasi politik pemilih perempuan dalam wujud kontrol desa masih terabaikan. Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah alat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis (Garis & Tristina, 2021).

Terdapat 5 hal yang menyebabkan ketidakadilan gender menurut Mansyur Faqih (Faqih, 2013, pp. 13-21) :

a) Stereotype

Sebuah pelabelan negatif yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu dianggap bahwa hendak setinggi apapun dia berpendidikan, tetapi pada akhirnya akan mengurus wilayah domestik.

b) Subordinasi

Menempatkan posisi perempuan dibawah dari posisi laki-laki dan seolah perempuan tidak kompeten menjadi atasan laki-laki.

c) Marjinalisasi

Peminggiran perempuan dalam suatu keadaan tertentu yang memaksanya tidak dapat menjalankan hal tersebut.

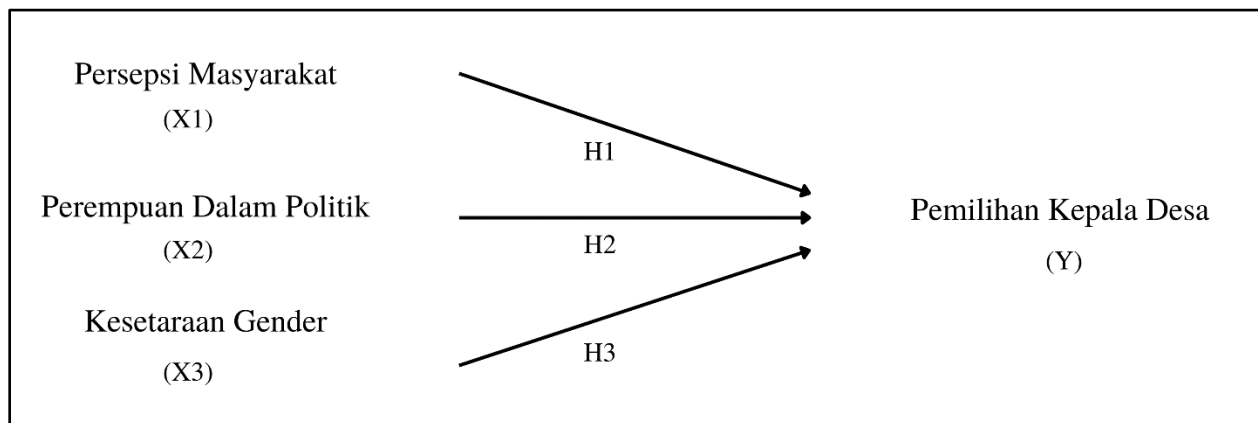
d) Beban Ganda (Double Burden)

Perempuan karier yang bekerja di ranah public, ketika sudah masuk ke rumah (ranah domestic) perempuan juga dituntut untuk menyelesaikan semua pekerjaan domestic tersebut.

e) Kekerasan

Banyak kekerasan yang membuat perempuan menjadi korban, diantaranya yaitu kekerasan verbal dan non-verbal karena banyak yang memandang bahwa perempuan lemah sehingga dirasa tidak memiliki daya dan upaya untuk membela dirinya.

**Gambar1. 1**  
**Model Penelitian**



**Keterangan :**

X1 adalah variable independen/eksogen ke-1

X2 adalah variable independen/eksogen ke-2

X3 adalah variable independen/eksogen ke-3

Y adalah variable dependen/endogen

H adalah hipotesa

## **G. Hipotesa**

- 1. Persepsi Masyarakat Mempengaruhi Hasil Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019 Secara Positif Dan Signifikan.**
- 2. Perempuan Dalam Politik Mempengaruhi Hasil Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019 Secara Positif Dan Signifikan.**
- 3. Kesetaraan Gender Mempengaruhi Hasil Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019 Secara Positif Dan Signifikan.**

## **H. Definisi Konseptual Dan Operasional**

### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah definisi yang dipakai oleh peneliti dalam menentukan ruang lingkup suatu masalah yang nantinya akan dijadikan variable dalam proses penelitian. Konsep tersebut nantinya akan penulis jadikan sebagai pedoman dalam mengoperasionalkannya di lapangan, yang selanjutnya dapat memudahkan dan mengkontekstualisasikan teori yang digunakan. Oleh karena itu, maka ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

#### **1.1. Persepsi**

Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah penilaian individu terhadap suatu obyek yang didasari oleh faktor dari dalam dan luar individu itu sendiri kemudian diterima langsung oleh panca inderanya yang mana langsung memproses stimulus tersebut sehingga dapat mengkategorikan sesuatu.

#### **1.2. Perempuan Dalam Politik**

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum. Perspektif hak asasi manusia tidak lupa harus melihat pentingnya keterwakilan dan kesetaraan partisipasi kaum perempuan itu sendiri. Sayangnya hal tersebut terhambat oleh faktor modal yang di habiatus atau di halangi oleh politik patriarkhi.

### 1.3. Kesetaraan Gender

Dari paparan diatas dapat diartikan bahwa kesetaraan gender adalah posisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dalam mendapatkan haknya dan tidak adanya diskriminasi atas hal tersebut.

## 2. Definisi Operasional

**Tabel 1. 2**  
Definisi Operasional

Variable	Indikator	Parameter
X1 (Persepsi)	Kategori Primitif	Masyarakat mengenali atau mengetahui informasi calon pemimpin perempuan dari diri sendiri ataupun orang lain serta visi dan misi calon pemimpin perempuan yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019.
	Mencari Tanda (clue search)	Masyarakat menilai dengan melihat visi dan misi, riwayat perjalanan (track

		record), dan faktor lain yang akan mempengaruhi keputusan pilihan mereka.
	Konfirmasi	Masyarakat memutuskan calon yang akan dirinya pilih dengan dengan tidak lagi sembarangan menerima masukan atau informasi dari pihak lain, ia hanya menerima tambahan informasi yang menguatkan keputusannya.
	Konfirmasi Tuntas	Masyarakat menganggap pantas atau tidaknya calon perempuan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa dengan tidak menghiraukan informasi apapun.
X2 (Perempuan Dalam Politik)	Intrinsic Argument	Argumentasi masyarakat bahwa dari perspektif hak asasi manusia, kaum perempuan harus memiliki kesetaraan partisipasi dan perwakilan.
	Instrumentalist Argument	Merujuk pada fakta empirik bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda. Diasumsikan bahwa perempuan akan membawa fokus yang berbeda dengan nilai-nilai feminis ke dalam aktivitas publik.

X3 (Kesetaraan Gender)	Stereotype	Masyarakat memberi suatu pelabelan kepada perempuan.
	Subordinasi	Anggapan masyarakat ketika posisi perempuan dibawah dari posisi laki-laki dan seolah perempuan tidak kompeten menjadi atasan laki-laki.

Variable	Indikator	Parameter
Y (Pemilihan Kepala Desa)	Money Politik	Masyarakat mengetahui adanya praktik money politik.
		Money politik dalam pilkades adalah hal yang penting.
	Disinformasi	Masyarakat mengetahui adanya isu hoax atau hal yang tidak benar dalam proses Pilkades.
	Pengetahuan Tentang Cakades Perempuan	Masyarakat mengetahui tentang adanya Cakades perempuan dalam Pilkades Simbangdesa 2019
Masyarakat memiliki pengetahuan tentang Cakades perempuan.		

## I. Metode Penelitian

## **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa pada calon pemimpin perempuan di Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang pada Pemilihan Kepala Desa 2019, maka penelitian ini bertipe sebagai penelitian survey. Penelitian survey merupakan salah satu bentuk penelitian kuantitatif. penelitian *survey* adalah suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan pada masyarakat yang mengambil sampel dari satu populasi dan dalam mengumpulkan data pokok menggunakan kuesioner. Penelitian survey mengumpulkan data pada populasi yang mewakili seluruh populasi yang sedang diteliti (Adiyatna, 2019). Penelitian kuantitatif menurut Creswell dalam (Setyadi, Suradinata, Lukman, & Sartika, 2019) adalah kegiatan penelitian mengenai fenomena sosial atau manusia yang diuji atas beberapa teori yang terdiri dari variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis menggunakan teori untuk mendapatkan hasil penelitian. Pendekatan yang peneliti ambil berupa deskriptif yang mana seluruh data dan proses analisis akan memperlihatkan bagaimana persepsi masyarakat desa pada calon pemimpin perempuan di Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang pada waktu Pemilihan Kepala Desa 2019.

## **2. Populasi dan Sampel**

Populasi menurut Sugiyono dalam (Bhebeb Oscar & Sumirah, 2019) adalah seluruh element yang akan dijadikan sebagai wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan sampel yang diukur, yang menjadi subyek dalam penelitian atas obyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu berdasarkan yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh masyarakat yang telah berusia 17 tahun keatas atau sudah boleh memilih dan masuk

dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada saat Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa yang dilakukan pada tahun 2019. yang keseluruhan berjumlah 1744 orang.. Sampel menurut Sugiyono dalam (Bhebeb Oscar & Sumirah, 2019) adalah beberapa bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin  $[n = \frac{N}{1+Ne^2}]$  dengan taraf signifikan yang ditolerir (e) sebesar 10%.

Perhitungan sampel :

$$[n = \frac{N}{1 + Ne^2}]$$

$$n = 1744 / 1 + 1744 (10\%^2)$$

$$n = 1744 / 1 + 1744 (0,01)$$

$$n = 1744 / 1 + 17,44$$

$$n = 1744 / 18,44$$

$$n = 94,57$$

Dengan jumlah sampel 94,57 maka jumlah sampel dibulatkan menjadi 94-100 responden.

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas Toleransi Kesalahan  
(10%)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner menurut (Atmaja & Wahyu Wijaya, 2019) adalah alat yang digunakan sebagai pengumpul data primer dengan metode penelitian survey untuk mendapatkan pendapat responden. Kuesioner dapat diberikan kepada responden



dengan 3 cara yaitu secara langsung, melalui pos, dan melalui email atau elektronik. Jadi penelitian ini menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian. Kuesioner dibuat dalam bentuk *print out* dan *google form*. Peneliti menyebarkan kuesioner berbentuk *print out* dan *google form* kepada masyarakat yang telah menjadi DPT pada Pemilihan Kepala Desa Simbangdesa Tahun 2019 dengan menggunakan *purposive sampling* dari 1750 populasi. Apabila jumlah responden yang dikehendaki untuk mengisi *google form* sebanyak 94-100 sudah terpenuhi, maka peneliti menghentikan penyebaran *google form* itu.

#### **4. Instrumen dan Pengukuran Data Penelitian**

Instrumen penelitian menurut (Yusup, 2018) adalah metode atau alat yang digunakan peneliti untuk mengukur objek atau mengumpulkan data yang didapatkan dari suatu variabel penelitian dan untuk mendapatkan data yang benar maka dibutuhkan instrumen yang valid dan akurat sehingga memberikan hasil penelitian yang sesuai. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup. Menurut Wirawan dalam (Giantara & Astuti, 2020) kuesioner tertutup adalah lembar pertanyaan yang pilihan alternatif jawabannya telah disediakan oleh pemberi kuesioner. Menurut Sugiyama dalam (Darna & Herlina, 2018) pengukuran data adalah kegiatan menetapkan atau memberi angka pada objek atau kejadian tertentu, memberi angka dan menetapkan disebut skala (*scale*), dan hasil pengukuran skala disebut dengan data. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk pengukuran data skala indikatornya. Menurut Sugiyono dalam (Firmansyah & Rosy, 2021) skala likert adalah mengukur pendapat masyarakat terhadap suatu kejadian menggunakan jawaban yang bervariasi dari sangat positif hingga negatif, skala likert digunakan untuk mengetahui

pendapat, sikap, & persepsi masyarakat terhadap fakta sosial. Penulis menetapkan kejadian yang akan diteliti secara spesifik yang disebut sebagai variabel penelitian.

## **5. Teknik Analisa Data**

Menurut Bogdan & Biklen dalam (Li & Kusuma, 2021) Teknik analisa data adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan data, mengklasifikasikan data, mensortir menjadi sebuah data yang dapat dikelola, mengamati pola data, meringkas yang penting dan dapat dipelajari, dan menentukan hasil data yang dapat dipublikasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis data. SEM-PLS (*Partial Least Square-Structural Equation Modeling*) adalah metode persamaan secara struktural yang digunakan untuk mengembangkan suatu teori yang sudah ada atau memprediksi suatu teori dan jumlah sampel yang digunakan pada analisis SEM-PLS setidaknya sebanyak 30-100 sampel (Anugra , Sulistiyawan , & Munadiroh, 2017). SEM-PLS dalam penelitian ini untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji regresi dan hipotesis. Validitas adalah instrumen yang berfokus pada ketepatan pengukuran dalam mengukur objek yang akan diukur, validitas dapat diukur menggunakan beberapa bukti secara konten/isi, dan secara kriteria (Yusup, 2018). Menurut Anastasi dan Urbina dalam (Suwartono & Moningka, 2017) reliabilitas adalah mengukur tingkatan suatu alat ukur dalam memberikan hasil yang memiliki kesamaan ketika dilakukan pengukuran berkali-kali pada gejala atau fenomena yang sama namun diwaktu yang berbeda. Menurut Gujarati dalam (Efendi & Nugroho, 2018) uji regresi adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu data dan mengambil kesimpulan mengenai hubungan ketergantungan dan perubahan antara variabel dengan variabel yang lainnya. Uji

Hipotesa menurut (Puspitorini, 2017) adalah proses untuk menemukan dugaan mengenai adanya korelasi antara dugaan mengenai hasil dan hasil yang sebenarnya.